

Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berbasis Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Mendukung Program MBG

Bulkis¹, Ari Sujipto², Damayanti³

¹Agribisnis, Faculty Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Majene, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

²arhy.unhas@gmail.com

Abstract

- Purpose** : This study aims to analyze the role of local community empowerment in strengthening regional food security based on local potential through the implementation of the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi.
- Method** : The study employed a descriptive qualitative approach using semi-structured interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while community empowerment was examined through Suharto's five dimensions: enabling, empowering, protecting, supporting, and maintaining.
- Results** : The findings indicate that Polewali Mandar possesses substantial local food resources from the agricultural, fisheries, livestock, and horticultural sectors that can support the implementation of the MBG Program. However, community participation in the local food supply chain remains limited by inadequate access to information, restricted production capacity, weak institutional support, and underdeveloped market mechanisms. These constraints reduce the potential contribution of local communities to a more inclusive and sustainable food system.
- Conclusion** : The MBG Program has the potential to function not only as a nutritional intervention but also as an instrument for strengthening local economic capacity and regional food security. Its effectiveness requires integrated community empowerment strategies that connect local food production, institutional support, market access, and community participation.

Keywords: community empowerment; food security; local food potential; Free Nutritious Meal Program; Polewali Mandar Regency

1. Pendahuluan

Permasalahan ketahanan pangan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Kondisi geografis yang luas, ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan akses terhadap pangan bergizi belum merata. Tantangan tersebut semakin kompleks di wilayah Indonesia Timur yang masih menghadapi kendala dalam distribusi pangan, biaya logistik, dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Fatimah et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pangan di wilayah Indonesia Timur masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur,

tingginya biaya distribusi, ketimpangan akses pangan, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pangan lokal.

Ketahanan pangan juga memiliki hubungan erat dengan status gizi masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup belum secara langsung menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi apabila masyarakat masih mengalami keterbatasan akses dan daya beli. Ruel dan Alderman (2013) menjelaskan bahwa peningkatan status gizi masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih luas melalui penguatan sistem pangan, peningkatan produksi pertanian, peningkatan akses pangan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, *Food and Agriculture Organization of the United Nations et al.* (2023) menegaskan bahwa transformasi sistem agripangan diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat sekaligus mengurangi ketimpangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan perlu diarahkan pada penguatan sistem yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pangan melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka 2024, berbagai komoditas seperti padi, jagung, kakao, sayuran, hasil peternakan, dan hasil perikanan menjadi bagian penting dalam struktur produksi daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2024). Potensi tersebut memberikan peluang bagi pengembangan sistem pangan berbasis sumber daya lokal. Namun, keberadaan potensi pangan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara optimal.

Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2023, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 8,65%, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi (Fadhlurrahman, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses pangan, meningkatkan pendapatan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pangan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan akses pangan bergizi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran, terutama peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Program pemberian makanan sekolah dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan ekonomi (Guio, 2023). Namun, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga oleh kesiapan sistem pangan daerah dalam menyediakan bahan pangan secara berkelanjutan. Kebutuhan bahan pangan dalam Program MBG memberikan peluang bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat dalam rantai pasok pangan. Keterlibatan tersebut dapat menjadi

strategi pemberdayaan masyarakat karena program pangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga dapat membuka peluang peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal dalam sistem pangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian pelaku pangan lokal masih mengalami keterbatasan dalam aspek modal, teknologi produksi, kapasitas usaha, akses informasi, kelembagaan, serta kemampuan memenuhi standar pengadaan pangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari program pangan pemerintah secara optimal. Abidin (2024) menjelaskan bahwa penguatan petani kecil membutuhkan dukungan melalui peningkatan akses terhadap teknologi, pembiayaan, kelembagaan, pasar, dan pendampingan usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem pangan. Suharto (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lima aspek utama, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat, meningkatkan kapasitas, memperoleh perlindungan, mendapatkan dukungan kelembagaan, serta mempertahankan keberlanjutan manfaat ekonomi.

Ada kesenjangan yang menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan daerah perlu dilihat tidak hanya dari perspektif ketersediaan pangan, tetapi juga dari perspektif kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari sistem pangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam potensi pangan lokal, mekanisme pemanfaatannya, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek ketersediaan pangan secara deskriptif, tetapi juga mengeksplorasi proses sosial, peran aktor lokal, peluang keterlibatan masyarakat, hambatan penyediaan pangan, serta bentuk dukungan kelembagaan dalam penguatan rantai pasok pangan daerah. Dalam penelitian ini, analisis pemberdayaan masyarakat menggunakan perspektif Edi Suharto (2010) yang mencakup lima aspek, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*) untuk melihat keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan Program MBG.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian dipilih karena daerah tersebut memiliki potensi pangan lokal yang beragam serta menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program MBG melalui dapur Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Kabupaten Polewali Mandar melibatkan berbagai aktor dalam sistem penyediaan pangan, seperti pemerintah daerah, pengelola dapur SPPG, petani, pelaku UMKM pangan, pedagang, dan kelompok masyarakat lokal yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap fenomena yang diteliti. Informan penelitian meliputi perangkat daerah terkait bidang pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan; pengelola dapur SPPG; petani lokal; pelaku UMKM pangan; kelompok tani; serta masyarakat yang berpotensi terlibat sebagai pemasok bahan pangan Program MBG. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan dan kapasitas informasi yang dimiliki terhadap fenomena penelitian. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai potensi komoditas pangan lokal, kapasitas produksi, mekanisme pengadaan pangan, keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok, hambatan pemasok lokal, serta bentuk dukungan pemerintah.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan daerah dan pelaksanaan Program MBG, meliputi data potensi pangan Kabupaten Polewali Mandar, data produksi komoditas pangan, data dapur SPPG dan penerima manfaat, data Pola Pangan Harapan (PPH), serta dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait ketahanan pangan. Data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan kondisi objektif wilayah penelitian serta memperkuat hasil temuan lapangan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis informasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian (Sugiyono, 2022). Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator fokus penelitian, lembar observasi, serta format dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait potensi pangan lokal, sistem distribusi, kebutuhan MBG, dan pemberdayaan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kondisi nyata dari informan terkait sistem pangan daerah dan Program MBG. Teknik ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022). Observasi dilakukan terhadap kondisi wilayah sentra produksi pangan, aktivitas produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, sistem distribusi, serta kesiapan sarana pendukung rantai pasok pangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis, laporan, arsip, foto, serta data pendukung lainnya untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi (Yin, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilah dan dikodekan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik

berdasarkan aspek ketahanan pangan daerah, identifikasi komoditas unggulan, pemetaan kebutuhan MBG, pemanfaatan pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Edi Suharto (2010). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penguatan ketahanan pangan daerah melalui Program MBG

3. Hasil

Potensi Pangan Lokal Kabupaten Polewali Mandar sebagai Basis Implementasi Program MBG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi sumber daya pangan lokal yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Potensi tersebut terlihat dari keberagaman sektor produksi pangan yang mencakup tanaman pangan, buah-buahan, ikan, pangan hewani, dan sayuran. Kondisi ini menjadi modal penting karena kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya membutuhkan bahan pangan pokok, tetapi juga memerlukan variasi pangan untuk memenuhi standar gizi dalam penyediaan makanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data potensi pangan Kabupaten Polewali Mandar, kelompok tanaman pangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dibandingkan kelompok pangan lainnya. Distribusi produksi pangan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Produksi Pangan Kabupaten Polewali Mandar

No	Kelompok Komoditas	Total Produksi	Persentase
1	Tanaman pangan	270.217,68 ton	72,51%
2	Buah-buahan	63.442,52 ton	17,02%
3	Ikan	33.378,36 ton	8,96%
4	Pangan hewani/daging dan telur	4.005,43 ton	1,07%
5	Sayuran	1.631,65 ton	0,44%
Total		372.675,64 ton	100%

Sumber: Data olahan Disbunholper Kabupaten Polewali Mandar 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa struktur produksi pangan Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh tanaman pangan. Dominasi tersebut terutama berasal dari produksi padi sawah yang mencapai 250.381,60 ton, jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya seperti jagung, ubi kayu, dan padi ladang.

Dominasi tanaman pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki kekuatan dalam penyediaan bahan pangan pokok, khususnya beras. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Program MBG karena kebutuhan karbohidrat utama dapat dipenuhi dari produksi lokal. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan pangan lokal tidak cukup hanya berdasarkan jumlah produksi, tetapi membutuhkan sistem penghubung antara produsen lokal dengan kebutuhan operasional dapur SPPG.

Dengan demikian, keberadaan potensi pangan daerah belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat produsen pangan telah memperoleh manfaat ekonomi dari Program MBG. Pemanfaatan potensi tersebut sangat bergantung pada mekanisme pengadaan, keterbukaan

informasi kebutuhan dapur, standar kualitas bahan pangan, serta pola kerja sama antara pemerintah, SPPG, petani, dan pelaku UMKM

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Program MBG Berdasarkan Pendekatan 5P

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penelitian ini tidak hanya dianalisis sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Pendekatan pemberdayaan digunakan karena keberhasilan program pangan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan makanan, tetapi juga oleh sejauh mana program mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terlibat dalam rantai pasoknya.

Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan proses memperkuat kemampuan masyarakat agar mampu mengakses sumber daya, meningkatkan kapasitas, serta memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses pembangunan. Konsep pemberdayaan tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting), dan pemeliharaan (maintaining).

Berdasarkan hasil penelitian, kelima aspek tersebut telah muncul dalam implementasi MBG Kabupaten Polewali Mandar, tetapi dengan tingkat capaian yang berbeda. Program telah membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan bahan pangan lokal, tetapi masih terdapat tantangan dalam aspek akses informasi, kapasitas pemasok, perlindungan pelaku lokal, serta keberlanjutan manfaat.

Pemungkinan (Enabling): Membuka Akses Masyarakat terhadap Peluang Ekonomi MBG

Aspek pemungkinan (enabling) berkaitan dengan kemampuan program dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks MBG, pemungkinan dapat dilihat dari kemampuan program membuka ruang bagi petani, nelayan, dan UMKM lokal untuk terlibat sebagai bagian dari rantai pasok pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki modal produksi yang cukup besar untuk mendukung aspek pemungkinan tersebut. Wilayah ini memiliki berbagai sentra produksi pangan yang tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Wonomulyo menjadi salah satu wilayah strategis karena memiliki produksi padi sawah terbesar sebesar 54.512,82 ton dan juga menjadi salah satu sentra sayuran seperti sawi dan kangkung. Kecamatan Campalagian juga memiliki posisi penting sebagai sentra produksi padi sawah dan ayam broiler.

Keberadaan sentra produksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kapasitas sebagai pemasok bahan pangan MBG. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Salah satu informan menyampaikan:

“Kami tidak tahu apa yang dibutuhkan dapur MBG, hasil panen kami jual di pasar.”

(Wawancara Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya terletak pada kapasitas produksi, tetapi juga pada keterhubungan informasi antara masyarakat produsen dengan sistem pengadaan MBG. Dalam perspektif Suharto (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemungkinan belum sepenuhnya optimal. Masyarakat telah memiliki aset berupa kemampuan produksi, tetapi belum memperoleh akses yang cukup terhadap peluang ekonomi yang diciptakan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kamau et al. (2025) yang menunjukkan bahwa program pangan berbasis lokal dapat meningkatkan keterhubungan antara sektor pertanian dan kebutuhan institusi, tetapi keterlibatan petani kecil masih dipengaruhi oleh faktor akses informasi, kapasitas produksi, serta mekanisme pengadaan.

Dengan demikian, aspek pemungkinan dalam MBG Kabupaten Polewali Mandar perlu diperkuat melalui pembangunan sistem informasi pangan lokal yang mampu mempertemukan kebutuhan dapur SPPG dengan kapasitas produksi masyarakat.

Penguatan (Empowering): Meningkatkan Kapasitas Petani dan UMKM Lokal

Aspek penguatan (empowering) berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam suatu program pembangunan. Dalam konteks MBG, penguatan masyarakat tidak hanya berarti meningkatkan jumlah produksi pangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar kebutuhan program, seperti kualitas produk, kontinuitas pasokan, keamanan pangan, dan kemampuan administrasi usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa bentuk dukungan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti bantuan bibit, bantuan alat produksi, pelatihan pengolahan pangan, serta penguatan kelompok masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penguatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan rantai pasok MBG. Sebagian masyarakat telah mampu menghasilkan produk pangan, tetapi belum seluruhnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemasok program secara berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan UMKM pangan dalam program. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan:

“Tempe dan tahu kami dibeli sama Pak To dan katanya untuk MBG.”

(Wawancara Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produk UMKM lokal telah masuk dalam rantai pasok MBG. Akan tetapi, mekanisme keterlibatan tersebut masih belum sepenuhnya menunjukkan hubungan langsung antara UMKM dengan pengelola dapur SPPG. Dalam perspektif pemberdayaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berada pada tahap awal penguatan, tetapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan agar masyarakat mampu memanfaatkan kesempatan tersebut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan masyarakat dalam MBG perlu diarahkan pada:

1. peningkatan kapasitas produksi;
2. pelatihan standar keamanan pangan;
3. peningkatan kemampuan pengemasan;
4. penguatan manajemen usaha;
5. pendampingan akses pasar.

Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi menjadi bagian aktif dalam sistem ekonomi program.

Perlindungan (Protecting): Menjamin Keberlanjutan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Aspek perlindungan (protecting) berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kelompok masyarakat yang telah memperoleh kesempatan tidak kehilangan akses akibat adanya

ketimpangan dalam sistem. Dalam pelaksanaan MBG, aspek perlindungan menjadi penting karena rantai pasok pangan memiliki potensi dikuasai oleh pemasok tertentu yang memiliki modal, informasi, dan jaringan lebih besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam MBG telah mulai berjalan, tetapi belum terdapat mekanisme yang secara kuat memastikan keberlanjutan keterlibatan tersebut. Sebagai contoh, meskipun sebagian kebutuhan sayuran telah diperoleh dari petani lokal, kebutuhan buah tertentu masih dipenuhi dari luar daerah karena faktor ketersediaan dan karakteristik komoditas. Kepala SPPG Polewali 3 menjelaskan:

“Bahan baku kami sebagian besar berasal dari petani langsung, seperti selada yang kami ambil langsung dari petani di Passiang. Hanya buah saja yang kami ambil dari luar, seperti anggur.”

(Wawancara Juni 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pangan lokal telah berjalan, tetapi belum seluruh kebutuhan program mampu dipenuhi oleh produsen lokal. Dalam konteks perlindungan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang menjaga keseimbangan antara standar kebutuhan program dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. penyusunan prioritas pemasok lokal;
2. pendampingan pemenuhan standar kualitas;
3. transparansi mekanisme pengadaan;
4. kepastian hubungan kerja sama.

Tanpa mekanisme tersebut, program berisiko hanya memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan jaringan program

Penyokongan (Supporting): Peran Pemerintah dalam Membangun Ekosistem Pangan Lokal

Aspek penyokongan (supporting) menunjukkan bagaimana pemerintah dan lembaga terkait memberikan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak SPPG sebelum pelaksanaan MBG. Sekretaris Dinas Pertanian menyampaikan:

“Sebelum dapur MBG dibuka pihak SPPG datang ke kantor berkonsultasi dengan kami meminta data potensi yang ada di daerah kami. Kami memiliki potensi lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat kami, seperti beras, sayur, ikan dan buah-buahan lokal.”

(Wawancara Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses awal pemetaan potensi pangan daerah sebelum pelaksanaan program. Koordinasi tersebut menjadi bentuk penyokongan karena pemerintah berperan menyediakan informasi dan mempertemukan kebutuhan program dengan sumber daya lokal.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa dukungan tersebut masih perlu diperkuat melalui sistem kelembagaan yang lebih permanen. Dukungan pemerintah tidak cukup hanya berupa penyediaan data, tetapi perlu dikembangkan menjadi:

1. sistem informasi pemasok pangan lokal;
2. forum koordinasi lintas sektor;

3. pendampingan pelaku usaha;
4. evaluasi rantai pasok secara berkala.

Pemeliharaan (Maintaining): Menjaga Keberlanjutan Dampak Program

Aspek pemeliharaan (maintaining) berkaitan dengan kemampuan program mempertahankan manfaat pemberdayaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG mulai memberikan dampak ekonomi kepada sebagian pelaku usaha lokal. Salah satu contohnya adalah keterlibatan UMKM abon ikan dalam penyediaan makanan untuk dapur MBG. Pelaku UMKM menyampaikan:

“Betul abon ikan kami masuk di dapur MBG.” (Wawancara Juni 2026)

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi meningkatkan nilai tambah produk lokal. Komoditas perikanan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Namun, keberlanjutan manfaat tersebut masih membutuhkan penguatan. Apabila pelaku usaha hanya bergantung pada satu program, maka perubahan kebijakan atau kebutuhan menu dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, aspek pemeliharaan membutuhkan strategi berupa:

1. diversifikasi pasar;
2. penguatan kelembagaan UMKM;
3. peningkatan inovasi produk;
4. pengembangan jejaring usaha.

Dengan demikian, MBG tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi selama program berlangsung, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

5. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini diarahkan untuk menafsirkan keterlibatan masyarakat lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan dianalisis melalui lima pendekatan, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pendekatan 5P ini relevan digunakan karena penelitian tidak hanya melihat keberadaan program MBG sebagai layanan pemberian makanan, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut membuka peluang ekonomi, memperkuat kapasitas masyarakat, melindungi pelaku lokal, menyediakan dukungan kelembagaan, dan menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, pedagang, serta kelompok masyarakat lokal.

Berdasarkan data potensi pangan, Kabupaten Polewali Mandar memiliki produksi pangan lokal yang cukup besar. Produksi tanaman pangan tercatat sebesar 270.217,68 ton, buah-buahan 63.442,52 ton, ikan 33.378,36 ton, pangan hewani/daging dan telur 4.005,43 ton, serta sayuran 1.631,65 ton. Data ini menunjukkan bahwa secara objektif daerah memiliki basis produksi pangan yang dapat mendukung kebutuhan dapur SPPG/MBG. Namun, potensi produksi tidak otomatis berarti pemberdayaan telah berjalan. Potensi pangan baru memiliki makna pemberdayaan apabila mampu dihubungkan dengan akses masyarakat terhadap rantai pasok, informasi pasar, kemampuan produksi, perlindungan usaha, dan keberlanjutan kerja sama.

Secara konseptual, temuan tersebut sejalan dengan literatur home-grown school feeding yang menempatkan program makan sekolah sebagai instrumen yang dapat menghubungkan tujuan gizi, pendidikan, dan pembangunan pertanian lokal. Masset dan Gelli (2013) menjelaskan bahwa program makan sekolah berbasis lokal memiliki potensi untuk menghubungkan kebutuhan makanan sekolah dengan petani kecil dan aktor komunitas. Dengan demikian, MBG di Polewali Mandar dapat dibaca bukan hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai peluang pembangunan ekonomi lokal apabila pengadaannya diarahkan pada pangan lokal dan pelaku ekonomi setempat (Masset & Gelli, 2013).

Pemungkinan: Potensi Pangan Lokal Sebagai Dasa Pembukaan Akses Ekonomi

Dalam teori Edi Suharto 2010, pemungkinan berarti menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam konteks penelitian ini, pemungkinan terlihat dari adanya potensi pangan lokal yang dapat menjadi dasar keterlibatan masyarakat dalam Program MBG. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki komoditas unggulan seperti padi sawah, jagung, ikan air payau, ikan air tawar, durian, pisang, telur, ayam, dan sayuran. Produksi padi sawah sebesar 250.381,60 ton menunjukkan kuatnya basis pangan pokok, sedangkan produksi ikan air payau sebesar 17.696,46 ton dan ikan air tawar sebesar 15.425,78 ton menunjukkan potensi protein lokal yang dapat mendukung kebutuhan menu MBG.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara struktural terdapat peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program. Temuan wawancara memperlihatkan bahwa sebagian bahan pangan telah diperoleh dari petani lokal dan sebagian produk UMKM, seperti tempe, tahu, abon ikan, dan roti, telah masuk dalam pengadaan dapur MBG. Hal ini menunjukkan bahwa program mulai membuka ruang ekonomi bagi pelaku lokal, meskipun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya merata.

Temuan ini konsisten dengan Singh et al. (2018), yang menekankan bahwa home-grown school feeding dapat menjadi instrumen untuk mendorong produksi pangan lokal dan memperkuat keberagaman pangan apabila pengadaan makanan dikaitkan dengan pasar lokal. Prinsip tersebut relevan dengan kondisi Polewali Mandar karena daerah memiliki potensi pangan yang beragam, tetapi potensi tersebut perlu dihubungkan secara sistematis dengan kebutuhan dapur SPPG. Namun, aspek pemungkinan dalam MBG di Polewali Mandar belum sepenuhnya inklusif. Sebagian masyarakat produsen pangan belum mengetahui kebutuhan dapur MBG, sehingga hasil panen tetap dijual melalui pasar umum. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pengelola program dan masyarakat produsen pangan. Dalam konteks pemberdayaan, kesenjangan informasi merupakan hambatan serius karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi apabila tidak mengetahui jenis bahan pangan yang dibutuhkan, volume permintaan, standar kualitas, jadwal pasok, dan mekanisme menjadi pemasok

Penguatan: Kapasitas Produksi Lokal Perlu dihubungkan dengan Standar MBG

Aspek penguatan dalam teori Edi Suharto berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sumber daya masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam konteks Program MBG, penguatan tidak cukup hanya dimaknai sebagai adanya potensi produksi pangan, tetapi harus dilihat dari kemampuan petani, UMKM, peternak, dan pedagang lokal untuk memenuhi standar dapur SPPG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa bentuk penguatan, seperti pembinaan kepada petani, bantuan alat pertanian, bantuan bibit, pelatihan pengolahan ikan, serta bantuan ayam petelur kepada kelompok masyarakat. Bentuk dukungan ini relevan karena kebutuhan dapur MBG bersifat rutin, besar, dan menuntut kualitas bahan pangan yang stabil.

Bantuan ayam petelur, misalnya, dapat dibaca sebagai bentuk penguatan produksi protein hewani. Hal ini berkaitan dengan data Pola Pangan Harapan yang menunjukkan bahwa kelompok pangan hewani memperoleh skor 23,4 dari skor maksimal 24,0. Skor tersebut menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani relatif baik, tetapi kebutuhan pasokan tetap harus dijaga secara berkelanjutan karena MBG melayani 149.080 penerima manfaat di Kabupaten Polewali Mandar.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan kapasitas merupakan syarat penting bagi keberhasilan pengadaan pangan lokal dalam program makan sekolah. Shrestha et al. (2020) menemukan bahwa home-grown school feeding di Nepal meningkatkan kualitas makanan sekolah dan keragaman pangan, tetapi keberhasilan tersebut ditopang oleh penguatan kapasitas aktor lokal, kepemilikan komunitas, dan rantai pasok lokal.

Dengan demikian, aspek penguatan dalam Program MBG di Kabupaten Polewali Mandar sudah tampak, tetapi masih bersifat parsial. Pemerintah telah memberikan dukungan produksi dan pelatihan, tetapi belum seluruh pelaku lokal memperoleh akses terhadap informasi kebutuhan dapur dan standar pemasok.

Perlindungan: Kebutuhan Regulasi Lokal dan Pencegahan Eksklusi Pemasok Kecil

Aspek perlindungan dalam teori Edi Suharto berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tersingkir oleh kelompok yang lebih kuat. Dalam konteks Program MBG, perlindungan berkaitan dengan jaminan kesempatan usaha yang adil bagi petani kecil, UMKM, pedagang lokal, peternak, dan kelompok masyarakat yang ingin masuk ke rantai pasok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi daerah khusus yang mengatur pelibatan masyarakat lokal dalam Program MBG. Pelibatan lokal masih mengacu pada juknis dan arahan teknis, sedangkan mekanisme perlindungan di tingkat daerah belum kuat.

Roothaert et al. (2021) menekankan bahwa keberhasilan home-grown school feeding sangat bergantung pada lingkungan kebijakan, koordinasi multipihak, kepemimpinan, dan pengaturan operasional. Penelitian mereka di Tanzania menunjukkan bahwa ketiadaan kebijakan yang jelas dapat menyebabkan kualitas, cakupan, dan keberlanjutan program menjadi lemah. Temuan tersebut relevan dengan Polewali Mandar karena arahan pemanfaatan pangan lokal belum cukup apabila tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah dan mekanisme operasional yang menjamin akses pelaku lokal (Roothaert et al., 2021). Dengan demikian, aspek perlindungan dalam Program MBG di Kabupaten Polewali Mandar masih lemah secara kelembagaan. Belum adanya regulasi daerah khusus, keterbatasan transparansi asal bahan baku, dan selektivitas supplier menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelaku lokal belum kuat.

Penyokongan: Dukungan Program Perlu Menjadi Sistem Pendampingan Terpadu

Aspek penyokongan dalam teori Edi Suharto 2010 berkaitan dengan pemberian dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran sosial dan ekonominya. Dalam penelitian ini, penyokongan terlihat melalui pelatihan, bantuan produktif, program Rumah Pangan B2SA, bantuan ayam petelur, serta adanya MOU atau kontrak kerja sama dengan supplier.

MOU dan kontrak kerja sama dengan supplier dapat menjadi bentuk penyokongan karena memberi dasar hubungan usaha yang lebih jelas antara pemasok dan dapur SPPG. Namun, kontrak tersebut perlu dipahami secara kritis. Kontrak dapat memberi kepastian permintaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang melemahkan pelaku lokal apabila syaratnya terlalu berat, tidak transparan, atau tidak memberi ruang perbaikan ketika pemasok mengalami kendala kualitas.

Coakley et al. (2025) dalam systematic review tentang local food procurement pada program farm-to-school menunjukkan bahwa pengadaan lokal berhubungan dengan peningkatan konsumsi sayuran pada siswa, tetapi sekolah menghadapi hambatan kapasitas, kemampuan, dan pendanaan untuk memperoleh pangan lokal. Temuan ini relevan karena dapur MBG di Polewali Mandar juga membutuhkan dukungan kelembagaan untuk memastikan pengadaan lokal tidak berhenti pada niat, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan aman (Coakley et al., 2025).

Dengan demikian, penyokongan dalam Program MBG di Kabupaten Polewali Mandar sudah ada, tetapi belum sepenuhnya menjadi sistem pendampingan terpadu. Program bantuan dan pelatihan perlu dihubungkan dengan sistem pengadaan, standar kualitas, pengawasan keamanan pangan, serta kepastian pasar. Dalam perspektif pemberdayaan, penyokongan yang ideal bukan hanya membantu masyarakat memproduksi, tetapi juga membantu mereka bertahan dalam rantai pasok MBG.

Pemeliharaan: Manfaat Ekonomi Perlu dijaga agar tidak bersifat sementara

Aspek pemeliharaan dalam teori Edi Suharto berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan kondisi yang telah memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat. Dalam konteks Program MBG, pemeliharaan berarti memastikan bahwa keterlibatan petani dan UMKM lokal tidak hanya terjadi sesaat, tetapi dapat berlangsung stabil dan memberi dampak ekonomi berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program MBG telah memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian pelaku lokal. Beberapa UMKM mengalami peningkatan pesanan, bahkan terdapat pelaku usaha yang meningkatkan kapasitas produksi setelah terlibat dalam rantai pasok MBG. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya stabil karena keterlibatan pemasok masih bergantung pada perubahan menu, kualitas bahan, dan keputusan dapur dalam mempertahankan atau mengganti supplier.

Nurlaili (2025) juga menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan apabila didukung oleh regulasi afirmatif, standar kualitas pangan yang terjangkau, dan kemitraan yang adil. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut memperkuat argumen bahwa keberlanjutan manfaat ekonomi tidak cukup bergantung pada banyaknya pesanan, tetapi membutuhkan tata kelola yang melindungi UMKM dari ketidakpastian permintaan dan perubahan menu.

Pemeliharaan juga berkaitan dengan kualitas pola konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 89,7 menunjukkan bahwa pola pangan sudah mendekati ideal, tetapi masih terdapat gap pada kelompok kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayur-buah. Kondisi ini menunjukkan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya mempertahankan pasokan beras dan protein hewani, tetapi juga mendorong diversifikasi pangan lokal.

Dengan demikian, aspek pemeliharaan dalam Program MBG di Kabupaten Polewali Mandar masih perlu diperkuat. Program telah memberi manfaat ekonomi kepada sebagian pelaku lokal,

tetapi keberlanjutan manfaat tersebut masih rentan. Untuk menjaga pemeliharaan, perlu ada rencana pasokan jangka menengah, komunikasi perubahan menu, kontrak yang adil, sistem evaluasi yang memberi ruang perbaikan, dan penyesuaian menu dengan musim serta sentra produksi lokal.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah berbasis potensi lokal melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai model integrasi antara kebijakan pangan pemerintah dan penguatan kapasitas masyarakat. Implementasi MBG tidak hanya dipahami sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga sebagai peluang strategis dalam membangun ekosistem pangan daerah melalui keterlibatan masyarakat produsen, pelaku UMKM pangan, serta dukungan kelembagaan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki tiga modal utama dalam pengembangan MBG berbasis potensi lokal, yaitu ketersediaan sumber daya pangan lokal, keberadaan masyarakat sebagai produsen pangan, dan dukungan kelembagaan pemerintah daerah. Ketiga modal tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat Suharto (2010), pelaksanaan MBG di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan adanya proses pemberdayaan melalui lima dimensi utama. Dimensi pemungkinan (enabling) terlihat dari terbukanya peluang ekonomi baru bagi petani dan UMKM lokal melalui kebutuhan penyediaan bahan pangan program. Dimensi penguatan (empowering) tercermin dari kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pasokan pangan. Dimensi perlindungan (protecting) menunjukkan pentingnya kebijakan yang menjamin keterlibatan masyarakat lokal agar tetap memiliki akses terhadap peluang ekonomi program. Dimensi penyokongan (supporting) memperlihatkan peran strategis pemerintah daerah sebagai fasilitator yang menghubungkan potensi pangan lokal dengan kebutuhan pelaksanaan MBG. Sementara itu, dimensi pemeliharaan (maintaining) menegaskan pentingnya strategi keberlanjutan agar manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Polewali Mandar dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan daerah apabila implementasinya mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat produsen, memperkuat kelembagaan pendukung, serta menciptakan hubungan ekonomi yang berkelanjutan antara masyarakat lokal dan sistem pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan program pangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh aspek distribusi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi dan sumber daya lokal.

7. Referensi

- Abidin, J. Z. (2024). Penguatan petani kecil dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare*, 1(2), 79–93. <https://doi.org/10.61511/jssew.v1i2.2024.239>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2024). Kabupaten Polewali Mandar dalam angka 2024. <https://polewalimandarkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/555dc097fab9f6fb41bab3b0/kabupaten-polewali-mandar-dalam-angka-2024.html>
- Coakley, K. E., Lin, L., Gonzales-Pacheco, D., Thompson, O. M., Eldredge, J. D., Jimenez, E. Y., & Prescott, M. P. (2025). Multi-level health outcomes of local food procurement in United States farm-to-school programs: A systematic review. *Advances in Nutrition*. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100580>
- Fadhlurrahman, I. (2024, 21 September). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Polewali Mandar turun 2,79% dalam lima tahun terakhir. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7f2b29050737307/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-di-polewali-mandar-turun-279-dalam-5-tahun-terakhir>
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2023). The state of food security and nutrition in the world 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Guio, A.-C. (2023). Free school meals for all poor children in Europe: An important and affordable target? *Children & Society*, 37(5), 1627–1645. <https://doi.org/10.1111/chso.12700>
- Kamau, J., et al. (2025). Exploring smallholder farmers' access and participation in the Home Grown School Feeding Programme in selected counties of Kenya. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1476888>
- Kamau, J., Okoyo, C., Kanyui, T., Mwandawiro, C., Singh, S., & Drake, L. (2025). Exploring smallholder farmers' access and participation in the Home Grown School Feeding Programme in selected counties of Kenya. *Frontiers in Public Health*, 12, 1476888. doi:10.3389/fpubh.2024.1476888.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurlaili, Y. (2025). UMKM pangan dalam rantai pasok program makan bergizi gratis: Peluang pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Inen Paer*, 2(2), 68–81.
- Roothaert, R., Mpogole, H., Hunter, D., Ochieng, J., & Kejo, D. (2021). Policies, multi-stakeholder approaches and home-grown school feeding programs for improving quality, equity and sustainability of school meals in northern Tanzania. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 621608. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.621608>

- Shrestha, R. M., Schreinemachers, P., Nyangmi, M. G., Sah, M., Phuong, J., Manandhar, S., & Yang, R.-Y. (2020). Home-grown school feeding: Assessment of a pilot program in Nepal. *BMC Public Health*, 20, 28. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-8143-9>
- Singh, S., et al. (2018). Home-grown school feeding: Promoting local production systems diversification through nutrition-sensitive agriculture. *Food Security*, 10, 111–119.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---